

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Permasalahan

Setiap individu dalam melakukan komunikasi mempunyai ciri khas atau karakteristik tersendiri yang mana akan berbeda pada setiap individu. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Alo Liliwer (2014, h.308) bahwa setiap individu melakukan komunikasi sedikitnya dengan tiga gaya, dimana pada kenyataannya setiap individu dapat mempunyai hampir seribu gaya komunikasi yang berbeda-beda. Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa individu memiliki bermacam-macam kecenderungan gaya komunikasi dengan orang lain. Pada kenyataannya setiap individu tidak hanya mempunyai satu gaya komunikasi tetapi lebih dari satu gaya.

Gaya komunikasi seseorang dilihat dari pada penggunaan kata, bahasa, bahasa tubuh, penekanan intonasi maupun retorikanya. Hal tersebut menunjukkan identitas dan citra diri seorang individu dimata makhluk sosial lainnya yang akan mempengaruhi cara individu menyampaikan sesuatu (Effendy, 2007, h.28). Namun, cara seseorang berkomunikasi yang menjadi karakteristiknya juga dipengaruhi dari situasi yang dihadapinya. Gaya komunikasi bukan tergantung pada tipe seseorang saja melainkan bagaimana individu tersebut berbicara pada situasi yang sedang dihadapi (widjaja, 2000, h.65). Ketika seseorang sedih, marah ataupun bosan akan menggunakan gaya komunikasi yang berbeda-beda. Sama halnya juga ketika seseorang akan mengambil simpatik masyarakat atau

memberikan arahan akan menggunakan cara berkomunikasi yang berbeda pula namun tetap pada ciri atau karakteristik individu tersebut. Disisi lain memaksa seseorang untuk mengubah gaya komunikasi yang dimilikinya tidaklah gampang karena gaya komunikasi itu sendiri telah melekat pada kepribadian seseorang. Untuk itu secara general dapat digambarkan bahwa Gaya komunikasi merupakan proses kognitif yang mengakumulasikan bentuk suatu maksud dan tujuan supaya dapat dinilai secara keseluruhannya. (alo liweri, 2014, h.308-309)

Pada gaya komunikasi seseorang merupakan sekumpulan sikap komunikasi yang digunakan seseorang tersebut agar memperoleh tanggapan tertentu pada situasi yang tertentu pula (suranto, 2011). Untuk itu, gaya komunikasi penting pada seorang aktor politik karena pembentukan citra dilakukan melalui cerminan dari gaya komunikasinya. Terciptanya identitas diri yang baik melalui gaya komunikasinya akan mempunyai nilai yang baik juga terhadap masyarakat yang berujung pada dipilihnya aktor politik tersebut dalam suatu kedudukan pemerintahan, baik itu pada legislatif maupun eksekutif. Kesesuaian komunikasi yang digunakan tergantung pada maksud dari pengirim pesan dan harapan dari penerima pesan.

Seorang pemimpin memiliki gaya berkomunikasi yang berbeda-beda. Gaya komunikasi pemimpin adalah suatu sikap saat melakukan komunikasi antara pimpinan terhadap bawahannya, atau dapat dikatakan bagaimana cara pimpinan melakukan komunikasi dalam suatu organisasi. Gaya komunikasi pimpinan pada suatu organisasi atau kelompok tertentu dapat diterapkan namun terkadang tidak bisa diterapkan pada kelompok yang lain tergantung pada karakteristik kelompok

yang dipimpinnya (sendjaja, 2014, h.14). Untuk itu, dapat dikatakan bahwa gaya komunikasi dapat mengikuti kondisi dan situasi sehingga setiap individu dapat memiliki beberapa macam gaya komunikasi.

Pembentukan dan pembangunan citra dalam menggerakkan atau mempengaruhi *followers* untuk menghasilkan suatu produk akan mempengaruhi karakteristik gaya komunikasi pimpinan. seperti hal yang dikatakan sebelumnya bahwa pada situasi (penerima pesan/*receiver*) tertentu seseorang dapat menyesuaikan gaya komunikasinya. Untuk itu gaya komunikasi seorang pimpinan yang mampu memberikan pengaruh kepada *reciever* adalah dibutuhkan dalam Bergeraknya organisasi. Adapun pengaruh merupakan suatu rangkaian proses pemimpin dalam mengungkapkan gagasan, yang lebih lanjut memperoleh penerimaan atas gagasan serta dapat memotivasi bawahannya untuk mendukung serta melakukan gagasan melalui perubahan. (Robert N. Lussier and Christopher F. Achua, 2010:6.).

Tentunya gaya komunikasi yang diharapkan pada pemimpin organisasi pemerintah ialah dapat menggerakkan SDM nya sehingga mampu menghasilkan *output* yang baik serta menghasilkan *outcome* yaitu meningkatnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah. Untuk itu, aspirasi masyarakat maupun gambaran keadaan kondisi masyarakat serta pemahaman atau kompetensi dibutuhkan dalam pembuatan keputusan seorang pimpinan untuk menghasilkan *outcome*.

Menjelang pemilihan eksekutif maupun legislatif bermunculan orang-orang yang mencalonkan diri menjadi pemimpin baik itu tokoh baru maupun

tokoh lama di dunia politik. Tentunya masing-masing calon pemimpin memiliki gaya komunikasi tersendiri yang dibentuk agar dapat memikat hati masyarakat maupun pimpinannya agar dapat ditunjuk sebagai pimpinan pada suatu lini kepemimpinan. Untuk itu, gaya komunikasi mempunyai pengaruh dalam pembentukan persepsi individu yang melihatnya. Sehingga dalam pemilihan pemimpin dalam organisasi pemerintah membangun citra yang dilihat dari gaya komunikasi kepemimpinannya sesuai dengan yang diharapkan yaitu persepsi baik masyarakat terhadap dirinya maupun terhadap pimpinan yang akan memberikan mandat. Hal tersebut juga dilakukan oleh Presiden Indonesia saat ini yaitu Jokowi Dodo pada saat pemilihan dirinya menjadi Presiden Indonesia. Nama Mahfud MD diusung menjadi pendamping Jokowi pada pemilihan Presiden tahun 2018 muncul secara cepat melesat yang juga secara bersamaan juga cepat meleset yang digantikan dengan wakil presiden saat ini yaitu Maaruf Amin (tirto.id, 2018). Nama Mahfud juga digadang-gadang menjadi wakil Presiden Pada Pilpres 2014, namanya sempat terkerek dan diyakini sebagai calon kuat wakil presiden, baik untuk mendampingi Joko Widodo maupun Prabowo Subianto. Sebelum Pilpres 2014 yang dimenangkan Jokowi-Jusuf Kalla, nama Mahfud juga sempat dibidik Partai Gerindra sebagai calon pendamping Prabowo pada 2012, bersama calon lain, yakni Jusuf Kalla dan Sri Mulyani (Tirto.id, 2018). Berdasarkan data tersebut, sosok Mahfud MD merupakan seorang yang mempunyai kapabilitas sehingga kerap kali dipercaya untuk mendampingi calon pemimpin di Indonesia.

Tidak terpilihnya Mahfud menjadi Wakil Presiden pada Kabinet Kerja menjadikannya menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

Kemenko Polhukam adalah Kementerian yang pada Pemerintahan Indonesia yang membidangi koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Tugas Kemenko Polhukam berdasarkan Peraturan Presiden No 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan menyatakan ialah menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang politik, hukum dan keamanan. Gaya komunikasi pimpinan yang dilakukan oleh Mahfud menjadi unsur pembangunan citra Mahfud baik kepada pimpinanya maupun kepada publik sebagaimana mahfud dapat melakukan fungsinya serta mempengaruhi SDM pada Kemenko Polhukam agar dapat bergerak. Hal tersebut sejalan dengan Pace dan Faules (2010, h.48) bahwa gaya komunikasi kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dan fungsi kepemimpinannya dan bagaimana pemimpin dapat dilihat oleh bawahannya yang berusaha dipimpinnya, atau invidu yang mengamati dari luar. Untuk itu, dalam konteks Mahfud sebagai aktor politik Gaya kepemimpinan harus mencerminkan perilaku dan strategi, yang diterapkan seorang pemimpin dalam mempengaruhi masyarakat ataupun kinerja dan kemajuan suatu negara.

Menurut Luther Gulick, 1993 seorang pimpinan harus mempunyai kemampuan untuk memimpin organisasinya. Oleh sebab itu, seorang pimpinan merupakan faktor penentu atau faktor terpenting dalam keberhasilan organisasi tersebut. Mahfud MD seorang Menko Polhukam yang dituntut untuk mengemban fungsi yang melekat pada jabatannya yaitu mengkoordinasikan

Kementerian/Lembaga dibidang politik, hukum dan keamanan agar mampu mencapai keberhasilan dari organisasi tersebut. Pada saat mengumumkan menteri pada kabinet kerja Jokowi, Presiden menaruh harapan kepada beliau untuk menyelesaikan persoalan kepastian hukum dan derakalisasi. Namun, selain persoalan hukum, hal lain yang melekat pada tanggung jawab seorang Menko Polhukam ialah menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan negara. Kondisi tersebut memnutuhkan keahlian maupun kekuatan yang mampu melakukan koordinasi internal maupun antar Kementerian/Lembaga. Hal tersebut menjadi pertanyaan apakah beliau seorang berlatar belakang sipil mampu untuk menangani permasalahan diluar masalah hukum mengingat tugas dan fungsi dari Kemenko Polhukam yang juga melakukan koordinasi dan penyelesaian masalah pada bidang pertahanan dan keamanan.

Mahfud MD seorang Menko Polhukam yang dituntut untuk mengemban fungsi yang melekat pada jabatannya yaitu mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga dibidang politik, hukum dan keamanan. Koordinasi Bidang Polhukam memiliki sifat “Pemadam Kebakaran” atau sebahagian besar urusannya bersifat tak terduga. Di lain hal mempunyai fungsi untuk menjaga segala benturan K/L baik pada fungsi, kebijakan dan tanggung jawab dimana Menko Polhukam hadir sebagai penengah antar K/L atau *debottlenecking* (Perjanjian Kinerja Menko Polhukam, 2020). Lebih lanjut seorang pengamat militer Al-Chaidir mempunyai pendapat bahwa secara kebiasaannya, seorang sipil atau yang bukan berlatar militer akan menjadi kewalahan untuk menduduki jabatan sebagai Menko Polhukam. Fungsi yang melekat pada Menko Polhukam

dapat diakomodir oleh TNI yang merupakan organisasi modern bersifat rasional, dan cepat yang juga mempunyai pengalaman dibidang menjaga kestabilan negara yang keadaannya tidak dapat diprediksi terlebih orang awam diluar militer (<https://nasional.kompas.com>, 2015)

Setiap pimpinan memiliki gaya komunikasi yang berbeda antara satu dengan yang lain dalam menjalankan roda organisasinya supaya mencapai tujuan dan setiap pimpinan akan membangun gayanya sendiri-sendiri. Tentu jelas gaya komunikasi Mahfud akan cukup berbeda dengan kepemimpinan sebelumnya terlebih latar belakang seorang Mahfud sebagai seorang sipil. Adapun sebahagian besar tugas Mahfud MD sebagai seroang Menko Polhukam akan mengarahkan dan memimpin pejabat militer baik pada internal Kemenko Polhukam maupun eksternal yaitu Kementerian/Lembaga dibawah koordinasi Kemenko Polhukam seperti BIN, BNPT, BASARNAS, TNI, POLRI. Dalam memimpin individu maupun lembaga yang bersifat militer dibutuhkan kemampuan dan kepemimpinan agar koordinasi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik serta kebijakan publik yang dihasilkan dapat tepat sasaran sesuai dengan keadaan dan kebutuhan di masyarakat. Kebijakan publik adalah sesuatu yang membahas tentang apa yang akan dilakukan pemerintah dalam melihat masalah dan tuntutan, mengapa pemerintah perlu mengambil tindakan atau kebijakan tersebut, dan apa yang akan terjadi dari tindakan yang akan dilakukan tersebut (Winarno, 2017, h.53). Lebih lanjut kebijakan publik juga membahas implementasi pada pemerintah dalam melakukan kebijakan publik terkait bagaimana kebijakan yang telah dibentuk

terlaksana atau tidak. Tentu kebijakan yang dihasilkan akan berdampak luas ke masyarakat yang dapat menentukan kesejahteraan hajat hidup orang banyak.

Seperti yang dibahas sebelumnya bahwa gaya komunikasi pimpinan dapat mempengaruhi khalayak untuk memberikan perhatian kepada dirinya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nur (2018) tentang Gaya Kepemimpinan Aktor Politik (Studi Terhadap Kepemimpinan Anies Baswedan Dalam Kebijakan Penataan Kawasan Tanah Abang Tahun 2018) dan penelitian yang dilakukan oleh Ralph Jhonson (2017) tentang Memahami Gaya Komunikasi Politik Ganjar Selaku Gubernur Terhadap DPRD Jateng (Studi Kasus Persepsi DPRD terhadap Gaya Komunikasi Politik Ganjar Pranowo) telah melakukan analisa kepemimpinan terhadap satu permasalahan yang terjadi. Adapun pada penelitian Ahmad Nur (2018) menyimpulkan bahwa dari hasil kebijakan yang dikeluarkannya instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2018 tentang penataan kawasan tanah abang telah menimbulkan kerugian dan terdapat praktek mal administrasi. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil evaluasi ombudsman bahwa dari kebijakan tersebut telah ditemukan 4 (empat) mal administrasi dan Gubernur telah banyak menabrak aturan-aturan yang sudah ada. Dalam membuat suatu perumusan masalah, maka para pembuat kebijakan harus teliti dan bijak untuk menentukan atau melihat masalah yang sebenarnya terjadi agar pembuatan produk kebijakan publik tersebut benar-benar dapat menyelesaikan permasalahan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Untuk itu, melakukan analisis pada masalah menjadi penting dalam membuat suatu kebijakan jika tidak maka produk

kebijakan publik tersebut tidak tepat sasaran. Partisipasi masyarakat menjadi hal penting dalam sebuah proses kebijakan baik dalam bentuk tuntutan dan dukungan.

Adapun pada penelitian yang dilakukan oleh Ralph Jhonson (2017) tentang memahami gaya komunikasi politik Ganjar Pranowo selaku gubernur terhadap DPRD Jateng (studi kasus persepsi DPRD terhadap gaya komunikasi politik Ganjar Pranowo). Hasil dari penelitian tersebut ialah bahwa Ganjar selaku gubernur memiliki gaya komunikasi politik tersendiri dalam berkomunikasi dengan DPRD Jateng. Permasalahan dalam penelitian ini adalah terdapatnya masalah yang terjadi karena gaya komunikasi politik Ganjar yang dianutnya dalam melakukan komunikasi dengan DPRD Jawa tengah yang selama ini di sorot oleh media yang mana publik telah merasakan adanya gejolak dalam pemerintahan daerah. Hubungan komunikasi politik antara DPRD Jawa Tengah dengan dan Gubernurnya terlihat gaya agresif yang diperlihatkan dalam porses komunikasi dengan DPRD. Relasi hubungan Gubernur dengan DPRD berlangsung dalam ketidakseimbangan, karena dalam komunikasi politik dengan DPRD, Gubernur terlihat lebih agresif dan mendominasi. Hal ini untuk mendahulukan prioritas pesan dan terasa mengabaikan posisi anggota DPRD. Ganjar selaku komunikator politik yang juga pemimpin Kota Jawa Tengah dituntut harus mampu berkomunikasi politik dengan melakukan desain pemberian makna agar mampu mempengaruhi dampak yang baik di daerah jawa tengah. Hal itu sejalan dengan pemikiran Arifin (2011) bahwa komunikasi politik adalah suatu pembicaraan agar mempengaruhi kehidupan bernegara. Komunikasi politik juga

dapat diartikan sebagai seni untuk mendesain apa yang kemungkinan terjadi atau bahkan merupakan suatu seni mendesain yang tidak mungkin menjadi mungkin.

Dalam menganalisis gaya komunikasi kepemimpinan salah satu unsur terpenting ialah bagaimana seorang pemimpin mampu menyelesaikan suatu permasalahan atau kasus yang langkah-langkahnya mempunyai dampak baik dalam internal maupun eksternal. Werren dan Burt (2006, h.95) mengatakan bahwa kepemimpinan adalah suatu *power* penting dibalik kekuasaan yang mana agar melahirkan organisasi yang efektif maka perlu ruang lingkup kerja yang bisa dicapai yang kemudian dapat melakukan mobilisasi organisasi untuk berubah kearah visi bersama atau yang telah ditentukan. Untuk itu, selama proses kepemimpinan seorang pemimpin dalam mewujudkan visi dan menciptakan organisasi yang efektif akan mengeluarkan banyak kebijakan. Untuk itu, dalam penelitian selanjutnya untuk menganalisis gaya komunikasi oleh Mahfud MD peneliti akan melakukan analisa terkait bagaimana kebijakan yang dihasilkan Mahfud MD selama menjabat sebagai Menko Polhukam. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Nur (2018) dan Ralph Jhonson (2017) hanya menyajikan satu kasus permasalahan yang belum mewakili analisis dari gaya kepemimpinan itu sendiri. Berangkat dari hal tersebut, maka dalam penelitian ini akan menganalisis gaya kepemimpinan Mahfud MD akan menyajikan beberapa kebijakan baik yang pro maupun kontra yang telah dikeluarkan oleh Mahfud MD selama menjabat sebagai Menko Polhukam.

Selain dari kebijakan yang dihasilkan tentu pemimpin harus mempunyai sumber daya yang baik dalam menghasilkan suatu produk. Salah satu sumber

daya yang penting pada organisasi ialah sumber daya manusia. Apabila mengelola organisasi juga termasuk didalamnya mengelola sumber daya manusia yang mana memerlukan prinsip manajemen yang juga prinsip dan teori kepemimpinan. Pada seorang pemimpin adalah hal wajib untuk mempunyai kemampuan dalam menggerakkan dan memimpin organisasi, terutama dalam hal manajemen sumber daya manusia. Dengan demikian seorang pemimpin organisasi merupakan faktor kunci atau penentu atas keberhasilan organisasi yang dipimpinnya. Menurut Luther Gulick (dalam Sutarto, 1993) bahwa pengertian organisasi dalam hubungannya dengan kepemimpinan adalah alat yang saling mempunyai hubungan pada satuan kerja yang mana memberikan mereka kepada orang yang akan ditempatkan dalam struktur wewenang, sehingga pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh arahan para atasan kepada bawahannya yang juga menjangkau dari pimpinan yang paling atas sampai ke bawah dari seluruh lini organisasinya. Ganjar sebagai seorang elit politik mempunyai Gaya komunikasi politik yang merupakan ciri khas yang dimiliki oleh komunikator maupun seorang pemimpin dalam menyampaikan pesan. Dalam pemerintahan pun, gaya komunikasi politik dari komunikator politik mempengaruhi hubungan dalam kinerja pemerintahan.

Adapun pada penelitian sebelumnya dari Ralph Johnson (2017) dan Rina Nurahman (2017) melakukan penelitian dengan melihat sumber daya dalam mendukung pencapaian organisasi. Dapat dilihat dari penjelasan sebelumnya bahwa penelitian Ralph Johnson (2017) meneliti terhadap gaya komunikasi kepemimpinan Ganjar terhadap DPRD Jawa Tengah sedangkan Rindak Nurahman

(2017) melakukan penelitian tentang bagaimana gaya komunikasi pimpinan badan pemberdayaan masyarakat Aceh Selatan dalam memotivasi semangat kerja pegawai. Hasil penelitian dari Rindak (2017) menunjukkan bahwa pimpinan menggunakan dua gaya komunikasi dalam melakukan komunikasi organisasi yaitu gaya komunikasi satu arah dan gaya komunikasi dua Arah yang mana gaya komunikasi satu arah dapat dikatakan lebih sulit untuk memotivasi pegawai dibanding gaya komunikasi dua arah. Adapun menurut Wayne and. Faules (2006, h.132) Komunikasi organisasi merupakan suatu pemaknaan pada pesan pada setiap unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. Untuk itu, dibutuhkan gaya komunikasi pimpinan pada setiap unit organisasi dibawahnya maupun sejajar harus mampu menerjemahkan pesan agar mampu memotivasi atau mendorong sumber daya bergerak ke arah satu tujuan organisasi.

Setiap anggota organisasi perlu dilakukan pengaturan agar terciptanya suasana tertib agar efisiensi kerja dan maksimalisasi pencapaian tujuan, yang oleh sebab itu perlu adanya sosok pemimpin yang dapat mengatur pada semua kegiatan kerja anggota (Kartini, 2005, h.8-9). Namun selain dari pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi dan kebijakan yang dihasilkan, perlu diperhatikan bagaimana kompetensi komunikasi dari seorang pemimpin tersebut dapat mempengaruhi aktivitas organisasi (Arni Muhammad, 2014, h.67). Oleh sebab itu, setiap pemimpin organisasi dan para komunikator perlu memahami dan melakukan penyempurnaan pada kemampuan komunikasi mereka. Dalam memahami gaya komunikasi maka setiap individu harus dapat menciptakan atau bahkan setidaknya mempertahankan gaya komunikasi sebagai kharakteristiknya.

Gaya tersebut merupakan keunikan yang terdapat pada setiap diri manusia. Oleh sebab itu, sulit untuk memaksakan kepada orang lain untuk mengubah gaya komunikasi mereka yang sudah menjadi ciri khas. Adapun apabila mendorong seseorang agar mengubah gaya komunikasi yang ada pada dirinya tidaklah mudah karena gaya komunikasi seorang individu telah melekat pada kepribadiannya (Alo Liliweri, 2014, h.246)

Gaya komunikasi dapat dipandang sebagai proses pemaknaan pesan yang dikontektualisasikan terhadap pesan verbal yang mana dapat diinterpretasi secara berbeda. Pengertian tersebut menjelaskan mengapa seseorang berkomunikasi sebagai upaya untuk mencerminkan identitas dirinya sehingga mempengaruhi persepsi orang lain terhadap dirinya. Lebih lanjut Gaya komunikasi ialah sebagai campuran dari komunikasi lisan maupun ilustratif. Pesan yang ada pada individu yang digunakan dalam berkomunikasi yang diungkapkan melalui kata-kata tertentu yang mencirikan gaya komunikasi individu. Hal tersebut dapat berupa volume, nada, atas semua pesan yang telah diucapkan (Alo Liliweri, 2014 : 320). Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Bayu (2017) tentang analisis gaya komunikasi Ahmad Faiz Zainuddin. Ahmad Faiz Zainuddin adalah founder Spiritual Emotional Freedom Technique (SEFT) merupakan terapi yang menggabungkan ilmu akupunktur dan psikologi yang disempurnakan dengan sentuhan spiritual yang bersifat universal. Hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu kecenderungan gaya komunikasi Ahmad Faiz Zainuddin pada video pertama merujuk ke gaya komunikasi *the controlling style* dan pada video kedua menggunakan gaya komunikasi *the equalitarian style*. Perbedaan gaya

komunikasi yang di gunakan oleh Ahmad Faiz Zainuddin pada video yang diteliti dikarenakan perbedaan komunikasi yang dihadapi sehingga ia menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Sesuai dengan teori yang digunakan bahwa gaya komunikasi dapat berubah sesuai dengan kondisi (*art design*). Bagaimana seorang komunikator mampu mengubah bentuk permukaan gaya komunikasinya terhadap situasi dimana komunikator berada agar komunikasi percaya terhadap pesan yang diberikan. Untuk seorang Komunikator Politik, hal tersebut sangat penting mengingat target *outcome* pada pemerintahan publik ialah kepuasan masyarakat baik dari segi pelayanan yang diberikan, maupun karakteristik dari komunikator tersebut.

Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Drina (2017) tentang karakteristik Presiden Jokowi Dodo dalam pengambilan kebijakan. Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian tersebut adalah dalam menyampaikan kebijakannya, Jokowi memiliki kompetensi komunikasi yang meliputi aspek fleksibilitas, sensibilitas konsekuensi, keyakinan, empati, kecakapan dan komitmen. Kedua penelitian tersebut menganalisa gaya komunikasi pimpinan dengan memfokuskan kepada kompetensi dari komunikator. Bagaimana komunikator mampu mengelola pengetahuannya dan menyampaikan pesan agar mampu diterima dengan baik oleh komunikasi.

Gaya pemimpin memiliki tiga pola dasar yaitu mementingkan pelaksanaan hasil yang dapat dicapai, mementingkan hubungan kerja sama yang merupakan gaya dasar yang harus dilakukan oleh pimpinan dalam suatu organisasi (Hendra, 2010, h.504). Oleh sebab itu, gaya komunikasi seorang pimpinan berpengaruh

kepada bawahannya dalam menentukan arah organisasi sehingga gaya kepemimpinan yang didasarkan dari kompetensi pimpinan juga sangat mempengaruhi seorang pemimpin dalam menentukan kebijakan. Setiap pemimpin dari tingkat pusat sampai tingkat daerah memiliki gaya kepemimpinannya yang berbeda dalam melaksanakan roda pemerintahan serta mengeluarkan kebijakan. Adapun gaya seorang pemimpin sebagai elit politik turut mendeterminasi cara bagaimana kebijakan tersebut diformulasikan yang kemudian akan diimplementasikan. Gaya komunikasi pada seorang pimpinan menggambarkan perpaduan antara perilaku dengan gaya yang menjadi kepribadiannya.

Pemilihan gaya komunikasi yang tidak tepat menimbulkan persepsi yang tidak baik pada masyarakat terkait hasil yang ditawarkan. Dari kelima penelitian sebelumnya menyajikan informasi dan analisa gaya kepemimpinan dengan melakukan analisa dari kebijakan yang dihasilkan, pengelolaan gaya komunikasi pada sumber daya organisasinya dan kompetensi dari seorang pemimpin dalam menyampaikan pesan agar dapat diterima oleh receiver. Namun, dari kelima penelitian sebelumnya belum ada yang melakukan analisa tersebut. Melalui hasil dari tinjauan penelitian sebelumnya, agar mampu menghasilkan gambaran gaya komunikasi pimpinan secara keseluruhan maka penulis akan menggabungkan dari ketiga objek analisis yang dilakukan sebelumnya dalam melakukan analisis gaya komunikasi kepemimpinan Mahfud MD. Untuk itu, dalam melihat gaya komunikasi kepemimpinan Mahfud MD sebagai seorang non militer di Kemenko Polhukam akan melakukan analisa dari ketiga unsur tersebut.

1.2 Fokus Penelitian dan Rumusan Masalah

1.1.1 Fokus Penelitian

Penelitian ini memiliki fokus pada gaya komunikasi Mahfud MD ketika menjabat sebagai Menko Polhukam yang dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan pada staff Kemenko Polhukam yang diberikan arahan terkait penyelesaian permasalahan isu bidang politik, hukum dan keamanan.

1.1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan penelitian tersebut, penulis merumuskan pokok permasalahan penelitian ini menjadi sebuah pertanyaan yaitu Bagaimana Gaya Komunikasi Kepemimpinan Mahfud MD yang menjadi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi tentang Bagaimana Gaya Komunikasi Kepemimpinan Mahfud MD yang berlatar belakang non militer yang menjabat sebagai seorang Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dengan melakukan gambaran komunikasi kepemimpinan Mahfud serta melakukan identifikasi gaya komunikasi pimpinan yang dilihat dari sudut pengambilan kebijakan, kompetensi komunikasi Mahfud MD dan gaya komunikasi Mahfud MD dalam memberikan arahan di Kemenko Polhukam.

1.4 Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi bahan buat melakukan pembelajaran ataupun kajian informasi yang dapat berguna bagi mahasiswa ilmu komunikasi untuk melakukan pengembangan terkait teori gaya komunikasi kepemimpinan

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara spesifik menggambarkan bagaimana sebuah pola strategi komunikasi tokoh publik, dalam menyampaikan informasi sebagai bentuk transparansi akan kinerjanya yang perlu diketahui masyarakat luas. Selain itu, dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja pemerintah, serta memberi dampak spesifik kepada masyarakat akan kebutuhan transparansi kinerja pemerintahan.

